

## Daftar Pustaka

### a. Buku

Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

———. 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Budiardjo, Miriam, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya, oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: PT Bina Ilmu, .

Jufri, Muwaffiq, 2023, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Depok: Rajawali Pers.

Juliantara, Dadang, 2002, *Negara Demokrasi Untuk Indonesia*, Solo: Pondok Edukasi.

Kelsen, Hans, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Terjemahan dari buku *General Theory of Law and State* oleh Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media.

Marzuki, Suprman, 2014, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.

Nonet, Philippe dan Philip Selznick, 1978, *Hukum Responsif*, Terjemahan oleh Raisul Muttaqien dari buku yang berjudul

*“Law and Society in Transition: Toward Responsive Law, Harper & Row”*, Bandung: Penerbit Nusa Media.

Nugraha, Safri, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Qamar, Nurul, 2013, *Hak Asasi Manusia (Dalam Negara Hukum Demokrasi)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Rahayu, 2010, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Rajawali Pers.

Riyadi, Eko, 2018 *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*. Rajawali Pers.

Sarbaini dan Muhammad Elmy, 2019, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Banjarmasin: P3AI Universitas Lambung Mangkurat dan Nusamedia.

Setiadi, Edi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Smith, Rhona K.M., Njal Hostmaelingen, Christian Ranheim, dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.

Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers.

**b. Berita**

Arina Zulfa UI Haq, “Kronologi Aksi May Day di Semarang Berujung Ricuh,” *Detik Jateng* (Semarang) 2 Mei 2025, diunduh pada tanggal 10 Oktober 2025, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7896006/kronologi-aksi-may-day-di-semarang-berujung-ricuh>.

Kristi Dwi Utami, “Polisi Dinilai Melanggar HAM dalam Penanganan Demonstrasi di Semarang,” *Kompas* (Semarang) 3 September 2025, diunduh pada tanggal 10

Oktober 2025, <https://www.kompas.id/artikel/polisi-dinilai-melanggar-ham-dalam-penanganan-demonstrasi-di-semarang>.

Muhammad Iqbal Amar, “Kronologi Demo Hari Buruh Kota Semarang Berujung Ricuh, 24 Mahasiswa Ditangkap Aparat,” *Kompas* (Semarang) 1 Mei 2025, diunduh pada tanggal 10 Oktober 2025, <https://www.kompas.com/tren/read/2025/05/01/225711165/kronologi-demo-hari-buruh-kota-semarang-berujung-ricuh-24-mahasiswa?page=all>.

Nurhalija, Nadia. “Konsistensi Istilah Perlindungan atau Pelindungan dalam Hukum Mana yang Lebih Tepat?” *Portal Hukum* 24 Mei 2025, diunduh pada tanggal 10 September 2025, <https://portalhukum.id/belajar-hukum/konsistensi-istilah-perlindungan-atau-pelindungan-dalam-hukum-mana-yang-lebih-tepat/>.

Prihatnomo, “Demo Bela Affan di Depan Polda Jateng, Jalan Pahlawan Semarang Lumpuh,” *Detik Jateng* (Semarang) 29 Agustus 2025, diunduh pada tanggal 10 Oktober 2025, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-8086192/demo-bela-affan-di-depan-polda-jateng-jalan-pahlawan-semarang-lumpuh>.

Silvana Febriari, “Anak di Bawah Umur Terlibat Demo Anarkis di Semarang,” *MetroTvNews*, 3 September 2025, diunduh pada tanggal 10 Oktober 2025, <https://www.metrotvnews.com/play/NOICAvg2-anak-di-bawah-umur-terlibat-demo-anarkis-di-semarang>.

### c. Jurnal

Ahmadi, 2016, “Kontroversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom dan Hukum Responsif,” *Jurnal Al-‘Adl*, diunduh pada tanggal 20 Oktober <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/661>.

Gunawan, Muhamad Sahril, Haeruman Jayadi, dan AD. Basniwati, 2023, “Kedudukan Peraturan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan,”  
*Jurnal Diskresi*, diunduh pada tanggal 25 November 2025,  
<https://share.google/w03ZIXW0uxQIU3nmX>.

Muptiah, Ojang Oo, 2025, “Sistem Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Sebagai Bentuk Kedaulatan Rakyat Indonesia,”  
*Journal of Civic Education Research* 3, no. 1, diunduh pada tanggal 1 November 2025,  
<https://journal.tirtapustaka.com/index.php/jocer/article/view/102/127>.

Ias Muhlashin, 2021, “Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, hlm 87–100, diunduh pada tanggal 14 November 2024, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/18114>

**d. Peraturan Perundang-Undangan**

RI, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

RI, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

RI, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia

RI, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

RI, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

RI, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional RI, Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Peraturan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-XXII/2024

e. **Kamus**

Kamus Besar Bahasa Indonesia

